

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemenuhan hak asasi manusia menjadi salah satu barometer dalam menentukan maju atau tidaknya suatu negara dari aspek kesejahteraan sosial, yang merupakan tujuan Negara Indonesia.¹ Pemenuhan HAM ini termasuk didalamnya terhadap warganegara yang terkena proses hukum, dan ini merupakan konsekwensi dari sebuah negara hukum.²

Bantuan hukum, merupakan salah satu perwujudan dari penjaminan dan perlindungan hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan perlakuan secara layak oleh aparat penegak hukum sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, mengingat aturan hukum bersifat esoterik sehingga bagi masyarakat awam tidak mudah untuk mengerti dan memahami.³ Bantuan hukum menjadi salah satu alat untuk mencapai pemenuhan Hak Asasi manusia seperti yang tertuang dalam Pasal 54 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang”.

¹ Preamble alinea ke-empat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

² Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, lihat juga Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia . Jimlly Asshidiqie, 2005, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia(Aspek-aspek Perkembangan)*, Jakarta: UII Press, Hal.1 ciri-ciri Peradilan yang bebas dan tidak memihak, Legalitas, Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia

³ Setiyono Wahyudi (ed) Satjipto Rahardjo, 2008, *Lapisan-lapisan dalam Studi Hukum*, Malang: Bayumedia, Hal.97

Hal ini dipertegas lagi dalam Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada Pasal 56, yang berbunyi

*“1) setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu”*

Untuk mengatur keberadaan, tugas dan wewenang advokat yang salah satu tugas dan wewenangnya mengatur tentang pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan, maka dikeluarkanlah UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan maksud untuk membatasi agar profesi advokat hanya dilaksanakan oleh advokat, maka diaturlah dalam Pasal 31 yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat, tetapi bukanlah advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”

Keberadaan Pasal diatas jelas sangat membatasi kesempatan orang untuk mendapatkan bantuan hukum pada orang lain yang membutuhkan dan sekaligus membatasi hak tersangka dan terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum. Oleh karena itu keberadaan Pasal ini diajukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, alhasil *judicial review* diterima dengan putusan bahwa Pasal tersebut dihapuskan dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004

Menindaklanjuti putusan tersebut kemudian muncul Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Peradilan Umum pada Bab 1 butir 5

“Lembaga penyedia Bantuan Hukum adalah termasuk lembaga masyarakat sipil penyedia bantuan hukum atau unit kerja bantuan hukum pada organisasi profesi advokat, atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum di Perguruan Tinggi”

Perguruan Tinggi mencoba menerobos batas-batas kemampuannya untuk sebisa mungkin memberikan bantuan kepada masyarakat khususnya yang terlibat dalam masalah hukum, sesuai dengan tiga peran pendidikan tinggi di Indonesia yang dikenal dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu:⁴Pendidikan dan pengajaran; Penelitian dan; Pengabdian kepada masyarakat. Salah satu bentuk nyata pelaksanaan tri dharma Perguruan Tinggi adalah pengabdian kepada masyarakat yang dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk sesuai dengan disiplin ilmunya masing – masing, sebagai contoh untuk Fakultas Hukum dapat memberikan bantuan hukum untuk memenuhi hak asasi masyarakat guna memperoleh perlindungan hukum.

Keterlibatan mahasiswa dan dosen fakultas hukum dalam pemberian bantuan hukum yang berupa pelayanan konsultasi dan bantuan hukum konsultasi mempunyai arti penting terutama bagi negara yang mempunyai advokat dalam jumlah yang sangat minimum seperti Indonesia, sementara itu pelaksanaan bantuan hukum oleh fakultas-fakultas hukum mengandung aspek-aspek edukatif dalam rangka pendidikan klinis⁵. Hal ini yang membedakan antara LBH PT dengan LBH swasta lain sehingga penulis membuat penelitian dengan judul **“PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERGURUAN TINGGI DALAM PEMBERIAN PELAYANAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM KASUS PIDANA (Studi Terhadap Aspek Normative-empiris Di Surakarta)”**

⁴ Lihat Mohammad Ali, 2009 *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional, Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri Dan Berdaya Saing Tinggi*, Jakarta :Grasindo, Hal.177; lihat juga Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

⁵ Frans Hendra Winarta. 2011, *Bantuan Hukum Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*. Jakarta: PT. Gramedia. Hal.95

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana profil regulasi yang mengatur tentang kedudukan dan peran LBH PT dalam hal pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kasus pidana?
2. Bagaimana peran LBH PT (Dosen dan Mahasiswanya) dalam memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum bagi masyarakat dalam kasus pidana?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendiskripsikan profil regulasi yang mengatur tentang kedudukan dan peran LBH PT dalam hal pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kasus pidana
2. Mendeskripsikan dan mengeksplanasi peran LBH PT (Dosen dan Mahasiswa) dalam memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum bagi masyarakat dalam kasus pidana.

D. Manfaat Penelitian

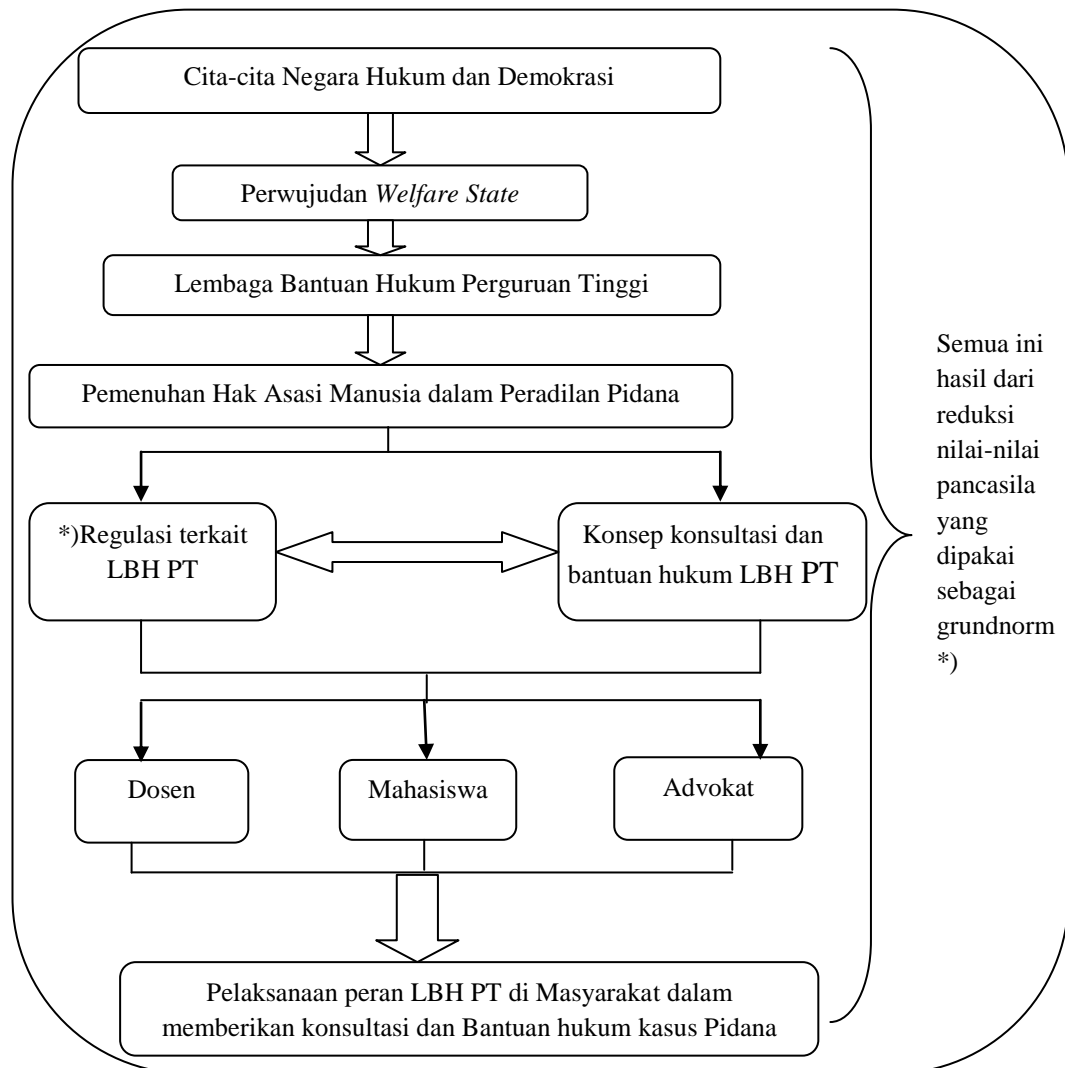
Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam hal bantuan hukum untuk kasus pidana oleh LBH PT
 - b. Memberikan suatu gambaran nyata tentang peran LBH Perguruan Tinggi dalam menghadapi kasus pidana yang terjadi di masyarakat serta bagaimana peran dosen dan mahasiswa yang selama ini diterapkan pada masing-masing LBH tersebut.
 - c. Menambah literatur bahan kajian bagi penelitian mengenai LBH PT

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan konsep mengenai tugas dan peran LBH Perguruan Tinggi dalam memberikan konsultasi dan bantuan hukum di masyarakat.
- b. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang hendak diteliti.

E. Kerangka Pemikiran



Keterangan : *) Menggunakan *stufenbau theori* dari Hans Kelsen. Dipuncak terdapat “grundnorm” atau kaidah fundamental yang merupakan hasil pemikiran yuridis.⁶

⁶ Lihat Soerjono soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-press ,Hal.127-128 yang mengatakan Suatu tata kaidah hukum merupakan sistem kaidah-kaidah hukum secara hierarkis, yaitu: (1) Kaidah hukum dari konstitusi; (2) Kaidah hukum umum atau abstrak dalam undang-undang atau hukum kebiasaan; (3) Kaidah hukum individual atau kaidah hukum konkrit pengadilan

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian normative-empiris⁷, yakni dengan mengidentifikasi kajian normatif mengenai LBH PT dan melihat keadaan riil yang terjadi mengenai peran LBH PT di Surakarta dalam pelayanan konsultasi dan bantuan hukum yang melibatkan dosen dan mahasiswa.

2. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif - analitis⁸ yakni mendeskripsikan dan menganalisis regulasi dan pelaksanaan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum oleh LBH PT di Surakarta

3. Lokasi Penelitian

Surakarta memiliki satu perguruan tinggi negeri, yakni Universitas Sebelas Maret (UNS) dan beberapa PTS yakni, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Universitas Islam Batik (UNIBA), Universitas Slamet Riyadi (UNISRI)⁹ yang kesemuanya itu memiliki LBH sebagai laboratorium FH dan mempunyai karakteristik yang berbeda satu dengan yang lain, sehingga dapat menjadi perbandingan.

4. Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

⁷ Roni Hanjito Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal. 34

⁸ Husaini Usman dan Purnomo Setiadyakbar, 2008, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Hal.130, lihat juga Johny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, Hal.310

⁹ Wikipedia, Perguruan Tinggi Di Surakarta, http://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Perguruan_tinggi_di_Kota_Surakarta, diunduh Pada Tanggal 21 Desember 2011 Pukul 20.43 WIB

Berupa keterangan atau fakta yang secara langsung, mengenai peran-serta LBH PT dalam pelayanan konsultasi dan bantuan hukum konsultasi kasus pidana serta keterlibatan dosen dan mahasiswa

b. Data Sekunder

Dibedakan menjadi dua bahan, yakni:

- a) Bahan hukum primer,¹⁰ meliputi Undang-undang(UU) Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, UUNo. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,dan regulasi terkait.
- b) Bahan hukum sekunder meliputi, Jurnal hukum, karya ilmiah, Literatur, Media Massa, Kamus dan ensiklopedia, dan sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan¹¹

Peneliti melakukan inventarisasi terhadap regulasi yang terkait dengan LBH PT dalam hal pelayan konsultasi dan bantuan hukum kasus pidana.

b. Studi Lapangan

1) Wawancara (interview)¹²

¹⁰ Morris L Cohen, penyadur Ibrahim R. 1994, *Sinopsis Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hal.1

¹¹ Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Rajagrafindo persada, Hal. 115

¹² Husaini Usman dan Purnomo Setiadyakber, *Loc. cit*, Hal.55-57

Wawancara dilakukan kepada pimpinan LBH PT dengan point-point wawancara meliputi kasus yang ditangani, posisi dan peran dosen, mahasiswa dan advokat dalam pelayanan konsultasi dan bantuan hukum konsultasi

2) Pengamatan (Observasi)¹³

Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara melihat, menyimak dan mencatat pelaksanaan pemberian pelayanan konsultasi dan bantuan hukum yang dilakukan oleh LBH PT.

6. Metode Analisis Data

Analisis penelitian ini akan menghasilkan deskriptif-analisa¹⁴ maksudnya peneliti awal menggambarkan profil regulasi kemudian dianalisis dengan menggunakan *stufenbau theory* untuk sinkronisasi vertikal, namun selain itu peneliti juga melakukan sinkronisasi horizontal sesuai dengan alur penelitian hukum normatif.

Analisis yang terkait dengan pelaksanaan pemberian konsultasi dan bantuan hukum awal dilakukan dengan deskripsi kemudian dilakukan pencocokan peran normatif dengan peran empiris yang dilakukan oleh LBH PT .

G. Sistematika Skripsi

BAB I : Berupa Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Pembatasan Masalah, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi.

¹³ Lihat Winarno Surtachmad, 1987, *Dasar dan Tehnik Research*, Bandung: Tarsito, Hal.162

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UB.Press, Hal. 15

BAB II: Berupa tinjauan pustaka yang menguraikan beberapa landasan teoritis mengenai tinjauan umum tentang Hak Asasi Manusia, pelayanan konsultasi dan bantuan hukum, tinjauan umum mengenai tindak pidana.

BAB III: Berupa hasil penelitian dan pembahasan yang menghubungkan antara data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka dengan data hasil penelitian lapangan yang berupa profil peraturan perundang-undangan dan Peran LBH dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat dalam kasus pidana.

BAB IV: Berupa kristalisasi hasil-hasil penelitian dan pembahasan, dan saran sebagai tindak lanjut dari penelitian.